

Dari 'Ekstrim Kanan' ke Terorisme

BAMBANG SAIFUL MA'ARIF ¹

¹ Dosen Fakultas Dakwah Unisba, JL. Ranggagading No. 8 Bandung,
Email: basmar_ali@yahoo.com,

Abstract

A religious understanding is one of the characteristics of muslim society. In one side, the depth of religious consciousness causes the rightness for the follower, but from another side, it potentially brings into the conflict. In Indonesia due to multi-religious perspectives, we know that 'ekstrim kanan' is addressed to those who embrace religion by high intensity without taking any tolerance to others' opinion and governance ideology. The aim of this article is to understand about the realm of religious 'ekstrim kanan'(fundamentalism) as social fact, its characteristic and historical dynamic, and its affinity to the terrorism. The approach of this article is interpretive, by studying on the literatures. From the research results, it can be concluded that the muslims' understanding will vary and fluctuate. Ulama's interpretation on the Qur'anic scripts (verses) and his interaction to the governance as prominent factor will be the trigger to 'ekstrim kanan'. Yet, not all of the realm of 'ekstrim kanan' will be trigger to the terrorism. Terrorism is merely as an ideological antagonism when there are present prerequisite factors, ie: a) abuse of power, b) exclusive social link, c) religious ideology as legitimate factor to attack another man and governance, and d) the dominance of outsider power in muslim community, especially to grassroot, until it marginalized them.

Kata kunci: Ekstrim Kanan, Terorisme

I. PENGANTAR

Meski kekuasaan tidak menjadi faktor yang signifikan dalam penerapan agama, ia dipandang memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Sehingga banyak kelompok dalam masyarakat yang memandang perlu untuk memengaruhi penguasa, atau bahkan meraih kekuasaan itu sendiri. Karena banyak sekali kelompok yang berebut untuk memperoleh kekuasaan, maka tidak terhindari terjadinya gesekan di antara sesama muslim dalam meraih kekuasaan. Satu dengan lainnya saling

menyudutkan. Koentowidjojo (2001: 310) menyatakan,

Apa saja dikerjakan oleh kekuatan Islamophobia untuk memojokkan umat. Melalui politik resmi, dalam sidang-sidang DPR/MPR (RUU Perkawinan 1973, masalah perjudian, masuknya Aliran Kepercayaan dalam GBHN 1978), melalui rekayasa sosial politik (umat diberi PR dengan masuknya tarekat tertentu dan adanya ganjalan umat, seperti Darul Hadis/LDII dalam Golkar; Peraturan Pemerintah pada tahun 1982 tentang larangan jilbab di sekolah; pembatasan-pembatasan dakwah) dan melalui politik keamanan (Komando Jihad/DI/TII/NII, Peristiwa Tanjung Priok 1984).

Pernyataan Koentowidjojo tersebut mengisyaratkan bahwa, terdapat berbagai istilah yang muncul dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak jaman Orde Lama, seperti Darul Islam (DI), Tentara Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia (NII). Jaman Orde Baru pun telah muncul istilah Komando Jihad, Gerakan Darul Hadis, Islam Jama'ah, Lembaga Kekarya-an Republik Indonesia (Lemkari), dan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII). Namun sejak tahun 1990an terdapat rekonsiliasi nasional dalam politik. Rekonsiliasi antara pemerintah dan umat, serta antara pihak pemerintah dengan oposisi. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong umat Islam menggaungkan lahirnya masyarakat sipil (masyarakat madani) yang egaliter.

Meski di Indonesia tidak dikenal 'oposisi' sebagai kekuatan resmi, suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah dipandang sebagai oposisi. Sekiranya tidak dilakukan rekonsiliasi itu niscaya ketidakpuasan kepada Orde Baru akan menjadi faktor pemicu lebih awal dari dilengserkannya Presiden Soeharto. Langkah tersebut telah memberikan angin segar bagi kaum muslimin di Indonesia, sehingga dapat mengerem ketidakpuasan bagi sebagian kaum muslimin. Orde Baru sebagai kekuatan dalam panggung sejarah selama 32 tahun berkuasa penuh menjadikan kaum muslimin berada dalam beragam posisi; dari yang semula dirangkul, ditakuti, dimarginalkan, kemudian dirangkul kembali; ketika pada tahun 1990, sekelompok cendekiawan muslim mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Lahirnya ICMI yang dibidani oleh BJ. Habibie menjadikan kelompok terpelajar dan teknokrat di Indonesia merasa tidak canggung dalam menjalankan perintah agamanya. Semua itu menandakan bahwa posisi umat Islam memiliki daya tawar cukup besar, di tengah semua kepentingan penguasa. Ada kesan bahwa semua itu dipertukarkan demi kepentingan kelompok, di mana konflik dikelola dengan manis. Ada kesadaran pada umat Islam begitu besarnya umat Islam di Indonesia, sehingga ia menjadi 'rebutan'

berbagai pihak yang berkepentingan, terutama berkaitan dengan pemungutan suara pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Umat Islam dalam menyikapi berbagai perkembangan keumatan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah, tidak satu, misalnya tentang asas tunggal. Sekelompok muslim menolaknya dengan tegas. Terutama karena kekhawatiran bahwa bila Pancasila dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum dan menjadi asas organisasi Islam, maka akan bertolak belakang dengan keinginan umat Islam yang ingin menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Kondisi ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi negara atas aqidah umat Islam. Masalah perekonomian juga menjadi satu ganjalan bagi umat Islam, di mana umat Islam keberatan bila pemerintah terlalu condong ke Barat, ke arah Kapitalisme-Liberal. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim yang mengusung prinsip *ta'awun* (saling menolong). Demikian pula dengan kebudayaan Barat yang dibiarkan menembus lapisan masyarakat muslim. Merespon dinamika keumatan tersebut, berbagai komponen umat Islam mengimbangnya dengan menggunakan kritik-kritik sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia.

Secara singkat, tulisan ini bertujuan untuk mengupas empat hal, yaitu: (1) Bagaimana ajaran Islam tentang keragaman 'pengamalan agama', (2) Apa karakteristik pemahaman keagamaan 'ekstrim kanan', (3) Bagaimana dinamika pemahaman pergerakan kelompok keagamaan 'ekstrim kanan' sejak jaman Orde Baru hingga era reformasi, dan (4) Bagaimana kaitan antara paham 'ekstrim kanan' dengan kelompok 'Teroris' di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Ajaran Islam dan Ragam Pengamalannya

1. Agama sebagai Jalan Kebenaran Manusia

Umat Islam dibimbing oleh Nabi Muhammad Saw. yang membawa ajaran

yang diabadikan dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian (*al-sunnah al-nabawiyah*). Setelah nabi wafat, kehidupan masyarakat beragama dibimbing oleh ajaran yang diwariskannya itu. Kitab suci diyakini oleh umat Islam sebagai mukjizat Tuhan yang abadi melalui tangan nabi-Nya. Kitab suci dijaga keotentikannya, karena hanya ajaran otentik yang dapat melahirkan kepercayaan akan kebenarannya. Secara filosofis, suatu ajaran disebut agama bila ia memiliki berbagai kriteria: (a) Mengajarkan adanya Zat Yang Maha Agung, (b) Ada pembawa ajarannya, (c) Memiliki ajaran dan kitab sucinya, (d) Ajaran tentang yang gaib dan hari pembalasan, dan (e) Mengajarkan kebaikan, kebahagiaan dan moral.

Semua kriteria tersebut penting sebab akal sehat tidak bisa menerima agama yang tidak mengajarkan akan adanya Zat Yang Maha Agung. Setiap ajaran harus memenuhi kriteria tersebut untuk bisa disebut sebagai agama. Agama yang benar menjadikan orang bahagia, karena semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Terutama kebutuhan spiritual. Agama yang hanya menawarkan kepuasan duniawi justru (akan) membosankan karena tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat transendental dan spiritual. Sementara itu, kebutuhan manusiawi meliputi perkara-perkara yang tidak semata fisik material. Oleh karenanya ajaran agama yang tidak menawarkan hal yang bersifat transendental dan spiritual tidak menggairahkan kehidupan manusia, cenderung membawa frustrasi.

Karena itu, ajaran yang mengklaim diri sebagai 'agama', namun tidak memenuhi lima kriteria di atas disebut sebagai 'pseudo agama' dan cenderung menyesatkan. Misalnya Marxisme, Liberalisme, Saintologi. Bahkan Kapitalisme pun bila dipandang oleh pengikutnya sebagai sesuatu pranata sosial yang dapat menyelesaikan masalah, berarti telah mengambil jalan agama, padahal hekekatnya tidak terbukti adanya kriteria agama tersebut.

Islam mengajarkan bahwa seorang muslim selalu berusaha untuk mendekatkan

diri (taqarrub) kepada Allah Swt. dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim ([taat], QS. 2: 132). Semua kebutuhan hidup dan kehidupan manusia (khususnya umat Islam) diatur secara lengkap oleh Islam, karena ia adalah agama yang lengkap (QS. 5: 3). Penyimpangan dari ketidaktaatan kepada Islam lebih sering karena dominasi nafsu atau tarikan duniawi. Semua umat Islam terkena keharusan untuk mengamalkan ajarannya, secara baik dan istikamah. Logika ini menjadi sandaran untuk bisa masuk kepada pengamalan Islam secara *kâffah*. Menerapkan hukum adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan muslim, baik secara individu maupun secara kolektif. Pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan ini akan menjamin suatu keadilan dan kebajikan. Ada ketidaksamaan dalam upaya untuk menerapkan agama, yaitu pada tataran mana menjalankan aturan Allah. Semua sepakat pada tingkat individu dan keluarga. Pada tataran kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan tidak perlu diatur secara langsung oleh hukum Allah, hanya nilai saja yang diambil darinya. Disinilah letak perbedaan itu. Terjadi perbedaan persepsi di antara ulama dengan negarawan (atau politikus) muslim.

2. Jihad antara Pemahaman dan Praksis

Setiap muslim dituntut untuk masuk ke dalam Islam secara *kâffah* (QS. 2: 208). Seorang muslim tidak serta merta dibiarkan menyatakan dirinya muslim tanpa diuji terlebih dahulu. Karena hadirnya ujian merupakan suatu tanda akan keimanannya (QS.29: 2). Setiap muslim dapat menjalankan peribadatannya dengan baik tanpa disertai dengan paksaan dan tekanan (QS. 2: 256). Di situ terjadi perbedaan dalam pelaksanaan ajaran agamanya. Ada kelompok yang berupaya untuk menjalankan agama dengan baik dan istikamah, namun ada pula yang melakukan agamanya dengan sedang-sedang saja, dan ada pula yang malas menjalankan ajaran agamanya, bahkan melakukan maksiat. Mereka disebut

sebagai zalim (QS.35: 32). Allah Swt. mengemukakan berbagai pengelompokan, misalnya, mukmin dan kafir, taat dan zalim, shalih dan maksiat, dan Ihsan dan pragmatis.

Ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dipahami secara berbeda oleh ulama, sehingga melahirkan perbedaan pelaksanaan agama. Perbedaan itu menimbulkan fiqih, yang menjadi sistem dalam pengelompokan pengamalan agama. Seorang imam menyatakan, *apabila suatu hadis benar maka ia adalah mazhabku*. Islam itu luas dan tidak mengekang umatnya untuk berkreasi dalam kehidupan, sepanjang masih berlandaskan pada syariat Islam.

Umat Islam dituntut untuk berjihad di jalan Allah. Tidak semua muslim menyanggapi ajakan, tetapi sebagian lagi bersiap diri dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuannya. Karena jihad merupakan seruan yang mulia dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Makna jihad awalnya berarti berjuang guna menegakkan agama Allah. Pengembangan Islam sampai ke seluruh dunia berkaitan dengan jihad, yang diimplementasikan dalam bentuk dakwah. Tujuan utama jihad adalah menegakkan syiar Islam dan keunggulan umatnya. Jihad memiliki konotasi yang luas, namun musuh-musuh Islam merasa takut, bila kaum muslimin dapat melakukannya dengan baik, dan menyebarkan ajaran Islam hingga akhir jaman. Makna jihad sesungguhnya adalah berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, bukan ke arah perang, walaupun kadang untuk mencapai tujuan itu dengan cara berperang.

3. Sinyalemen Nabi Saw. akan Lahirnya Perbedaan Paham

Islam hakikatnya satu yaitu yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun dalam praktiknya ia mengalami banyak bentuk. Dari awal sejarahnya kita mengenal satu pemahaman yang dikenal sebagai *Salafusshâlihîn*. Salaf bukan suatu aliran tertentu, tetapi merupakan suatu metode pemahaman yang menjadikan tradisi

Rasulullah Saw. (*al-sunnah al-nabawiyah*) sebagai basis pemahaman Islam. Rasulullah Saw. bersabda, *Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah ke dalam 73 golongan. Semuanya berada di neraka kecuali satu.* Sahabat bertanya, *'siapa mereka yang satu itu, ya Rasulullah?'* Nabi Saw. menjawab: *'yaitu apa-apa yang aku dan sahabatku berada di dalamnya.'*

Hadis tersebut merupakan sinyalemen Nabi Muhammad Saw. tentang akan munculnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Umat Nabi Muhammad Saw. — sebagaimana perjalanan umat-umat terdahulu — mengalami perpecahan, baik karena motivasi internal, eksternal maupun konvergen. Namun yang perlu memeroleh perhatian yaitu satu kelompok yang selamat (*al-firqah al-nâjiyah*), yaitu mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Kriteria itu kemudian disebut sebagai *'al-sâbiqûn al-awwalûn,'* atau *'Salaf al-shâlihîn,'* yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Saw. serta hidup berjamaah bersama dengan bagian umat Islam yang lainnya.

Dalam suatu riwayat Nabi Saw. bersabda, "Sebaik-baik kurun adalah kurunku, dan setelahku dan kemudian menyusul sesudahnya." Riwayat tersebut mengindikasikan bahwa generasi umat Islam terbaik adalah generasi Rasulullah Saw. lalu generasi selanjutnya, dan berikutnya.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa kaum muslimin tidak hanya satu paham. Kesemuanya berada di neraka kecuali satu. Yang satu itu pun masih mungkin untuk terjadi perbedaan paham di dalamnya sepanjang hanya pada urusan yang sekunder, bukan yang primer. Sedangkan perbedaan dalam masalah yang primer, yaitu aqidah (rukun iman dan rukun Islam) tidak ditolerir; jadi harus sama.

4. Akar-akar Radikalisme dalam Sejarah Islam

Umat Islam adalah mereka yang

mengikuti Al-Islam yang dibawa oleh dan dibakukan dalam Sunnah Rasulullah Saw. Penafsiran pada masa Islam awal nyaris tidak terjadi, kalaulah ada maka penafsirannya adalah interpretasi al-Qur'an dengan al-Qur'an, atau al-Qur'an dengan hadis Nabi. Landasan tersebut diikuti oleh *khulafâ al-Râsyidîn* (pengganti kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw.) sepanjang kepemimpinan mereka. Prinsip tersebut menjadi suatu dasar bagi kaum muslimin berikutnya. Artinya, kehidupan muslimin dalam bentuk kepemimpinan yang diakui oleh umatnya. Kelompok yang mengikuti prinsip ini dikenal sebagai 'kelompok mayoritas' (*al-sawâd al-a'zham*), di mana meski ajarannya didirikan oleh 2 orang tokoh, yaitu: Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi, namun ajaran tersebut kemudian diperkokoh oleh para pemikir dan fuqoha Islam para periode selanjutnya. Ajaran *Ahlussunnah* tersebut kemudian menjadi suatu kekuatan teologi dialektis (kalam) umat Islam, yang ajaran diapresiasi secara baik oleh umat Islam hingga kini. Di luar itu, satu aliran paham Syiah yang menjadi paham terbesar kedua setelah *Ahlussunnah wal-jama'ah*.

Dalam sejarah Islam terdapat beberapa kelompok yang muncul sejak jaman Ali bin Abi Thalib dikenal menggalang kekuatan dengan cara-cara yang cenderung menjadi embrio aliran yang kemudian dipandang sebagai radikal. Sejarah mencatat Khawarij, Muktaizilah dan Syi'ah berpandangan yang menyudutkan pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan aliran mereka. Hal ini karena salah satu komponen Khawarij adalah orang-orang Badui, yang menjadi eksponen dari sikap radikal tersebut. Abdullah (ed., II, 2002: 59) menyatakan,

Kelompok Badui yang memiliki keberanian mengagumkan tetapi sangat dangkal pemikirannya.... Mereka memiliki keuletan dan sangat tangguh dalam pertimbangannya. Karena itu mereka tidak sanggup untuk diajak bermusyawarah yang disertai dengan analisis yang rumit.

Untuk mengalahkan lawan-lawannya

Khawarij berhasil membina kader-kader militan, antara lain Abdurrahman bin Muljam yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib (40 H/661 M) saat sedang salat subuh.

Akan tetapi Khawarij mewajibkan pembentukan suatu negara buat umat Islam. Jika seseorang telah diangkat menjadi khalifah, tetapi ternyata tidak memiliki kecakapan dalam melaksanakan kewajiban maka ia harus diberhentikan (dimakzulkan) dan diganti dengan yang lain. Demikian pula dengan khalifah, seperti Ali yang menerima tipu muslihat Muawiyah yang berkedok tahkim (*arbitrase*). Namun, disamping itu masih ada unsur demokratisnya, yaitu bahwa pemimpin tidak harus dari Quraisy, dan tidak pula dari keluarga Nabi (Abdullah, 3, 2002: 342).

Dalam tradisi umat Islam, pemikiran orang-orang terdahulu yang sudah dipandang baku keberadaannya, maka tidak diingkari, baik sebagai khazanah pemikiran Islam maupun sebagai praktik kehidupan beragama. Khazanah umat Islam memberi peluang kepada kaum muslimin untuk memaknai temuan-temuan baru. Dalam terminologi fiqih dikenal, '*al-muhâfazhah 'ala al-qadîm al-shâlih wa 'l-akhdzu bi 'l-jadîd al-ashlah'* (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang terbaru yang lebih baik). Suatu kebaikan yang telah dipraktikkan oleh kaum muslimin menjadi bagian dari tradisi mereka dan bersifat mengikat. Apabila suatu hal sudah dipandang baik oleh para ulama, dan menjadi suatu kebutuhan umat Islam, maka ia dibakukan sebagai milik umat Islam. Para ulama dulu dikaji ulang oleh ulama kini, dan ulama kini akan dikaji oleh ulama berikutnya; bisa benar atau salah. Kesemuanya menjadi bagian dari ranah ijtihad. Dalam kondisi seperti itu kaum muslim memberikan legitimasi dalam praktik keagamaan maka ia menjadi bagian dari sunnah (tradisi) suatu kaum. Meski tidak mampu mengambil secara keseluruhan, ia bisa mengambil secara parsial. Kaidah fihiyyah menyatakan, "*mâ lâ yudroku kulluh lâ yutroku kulluh.*" (Apa-apa yang tidak diambil seluruhnya tidak ditinggalkan semuanya).

B. Karakteristik Pemahaman 'Ekstrim Kanan'

1. Pengertian 'ekstrim kanan'

Terma 'Ekstrim' merupakan suatu kondisi di mana pihak tertentu menganut pandangan yang paling ujung. Al-Mawrid (1990: 331) menyatakan bahwa, ekstrimisme (*al-tatharrufiyyah*) berarti radikalisme, yang senafas dengan Fundamentalisme. Ferm (1976: 291) mengungkapkan, fundamentalisme merupakan teologi dalam Kristen pasca perang dan merupakan reaksi agama terhadap perkembangan yang ada, diilhami oleh buku *The Fundamentals: A Testimony of Truth* (terbit antara tahun 1910-1912, 12 volume).

Masyarakat yang menganut pandangan paling ujung dalam suatu bidang, seperti bidang ekonomi atau politik disebut sebagai ekstrim. Sikap ini kadang menimbulkan benturan, karena adanya perbedaan pandangan, atau kepentingan yang tajam. Selain itu, benturan fisik sulit dicari titik temunya (Ensiklopedi Nasional Indonesia [ENI], jilid V, 1989: 52). Umumnya, tindakan tersebut disertai dengan sikap dan perilaku yang radikal karena fanatik pada satu paham.

Dalam babakan sejarah Indonesia dikenal dua jenis ekstrim, yaitu: Ekstrim kanan dan Ekstrim kiri. Di samping itu terdapat suatu padanan terma yang saling berdekatan, yaitu: radikalisme, fanatik, dan fundamentalisme. Terma tersebut memperoleh aksentuasi baru pada masyarakat Indonesia di era Orde Baru dengan istilah 'Ekstrim' mengacu kepada pendirian yang radikal dan fundamental. Fanatisme menyiratkan kekejaman dan daya saing, tidak satupun yang disebutkan adalah sesuai dengan teks al-Qur'an. Dari sikap ekstrim lahirlah apa yang dikenal sebagai ekstrimitas dan ekstrimisme, sikap mencari-cari kesalahan (*hair splitting* [Iqbal, 2003: 78]).

Sebagian orang secara alami lebih bergairah dan saleh dalam praktek beragama dibanding yang lain. Para ekstrimis barangkali salah dalam meletakkan gairah, sering memaksakan beban keagamaan atas

orang lain yang tidak seperlunya (Iqbal, 2003) secara membabi buta dalam berbagai bidang keagamaan atau kepercayaan. Fanatisme sering menimbulkan sikap dan perilaku negatif, yaitu pengejaran atau pembunuhan terhadap manusia demi tujuan atau paham yang dianut secara membabi buta, seperti pengikut Hitler (Effendi, 2001: 135) dan Mussolini. Semangat yang besar dalam menjalankan perintah agama ini berupaya untuk menjalankan perintah agama secara mendasar, murni dan istikamah. Seringkali tanpa memberikan nuansa penafsiran atau masuknya kebudayaan. Sedangkan fundamentalisme lebih ke arah gerakan kembali kepada al-Quran dan Sunnah, yang secara ketat menentang gerakan-gerakan ortodoks Islam, sebagai contoh adalah Islam Jamaah di Indonesia merupakan gerakan neo-ortodoksi dunia Islam sekarang ini (Ensiklopedi Islam [EI], jilid 1, 1988: 155). Bila ditelisik lebih lanjut, Fundamentalisme dalam perspektif Islam dapat pula bermakna, 'kembali kepada al-Quran dan Sunnah (*al-ruju' ila 'l-quran wa 'l-sunnah*).

2. 'Ekstrim Kanan' dalam Realitas Kebangsaan

Pengertian 'ekstrim kanan' dapat dilacak dari berbagai sumber yang terkait dengan pemahaman yang disandarkan pada agama. Pada jaman kemerdekaan Republik Indonesia, ekstrim kanan dialamatkan kepada DI/TII, karena memberontak dan bermaksud mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) serta menyebarkan maut di daerah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan (ENI, V, 1989: 53). Di Yogyakarta dan sekitarnya, tahun 1978-1980, muncul 'Komando Jihad' pimpinan Warman, yang bertujuan membentuk apa yang mereka sebut sebagai "Dewan Revolusi Islam Indonesia". Gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945 ini dikenal dengan pembajakan pesawat Woyla tahun 1981, pimpinan Imran. Sedangkan ekstrim kiri melakukan pemberontakan dan pembunuhan, yang biasa disebut sebagai Gerakan September 1965/PKI.

Agama sebagai sumber keyakinan,

pemahaman, dan perbuatan, sebagai oposisi pemahaman 'ekstrim kiri,' yang menekankan kepada pergerakan sosial berbasis diferensiasi ekonomi yang melahirkan paham kelas sosial. Kelas sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam berkarya, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kedua terma ini bersifat ideologis.

Konsep 'ekstrim kanan' merupakan satu kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat, yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Kelompok ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa dan negara. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna – sebagaimana diperintahkan oleh agama – dipandang sebagai suatu positif.

Pada masa pemerintahan Orde Baru pun banyak kelompok penentang Presiden Soeharto karena alasan agama, di antaranya adalah Abu Babar Ba'asyir yang dengan gigih menolak penetapan Pancasila sebagai asas tunggal. Demikian pula di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya, yang kemudian dikenal sebagai kelompok penyelamat, atau HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). Alasan penolakan bersifat keagamaan, bahwa aqidah umat Islam tidak boleh dicampuradukkan dengan ideologi sekuler, karena akan membawa kepada kemusyrikan. Argumentasi tersebut sesungguhnya bisa dipahami, namun karena persoalannya lebih ditarik ke ranah politis, sehingga penilaiannya menjadi bias. Kita perlu melakukan suatu kajian secara mendalam agar tidak menjadi korban pihak-pihak yang berupaya untuk mengeruhkan suasana. Kondisi itu terjadi bila kaum muslimin ditekan oleh iklim politik yang tidak memberi kesempatan untuk berpikir jernih.

3. Karakteristik 'Ekstrim Kanan'

Aktivis agama banyak yang menyelami agama sebagai usaha memurnikan atau

mereformasi kepercayaan dan praktik para pemeluk menurut dasar-dasar agama yang didefinisikan sendiri. Mereka itu akan menjadi lahan subur bagi disemaikannya paham-paham baru, dan sebagai kelompok yang kurang mentolerir budaya lokal. Esposito (jilid II, 2001: 84) menyatakan, 'Interpretasi fundamentalis menuntut usaha sadar-diri untuk menghindari kompromi, adaptasi, atau reinterpretasi kritis atas teks-teks dasar dan sumber-sumber kepercayaan. Arah dari gerakan ini adalah mendinamisasi ajaran Islam dan umatnya kepada suatu pergerakan menjadi suatu kekuatan yang aktif.'

Ciri-ciri dari pengamalan agama kelompok 'ekstrim kanan' adalah a) tidak mentolerir pandangan lain, terutama yang bersifat ideologis, b) tidak melihat pentingnya budaya masyarakat, c) menghendaki ajaran agama diterapkan secara paripurna mulai dari ajaran agama yang bersifat kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, d) Terhadap pihak yang tidak sepaham dengan pandangan keagamaannya, mereka tidak segan-segan memaksakan pemahamannya, meski dengan tindakan kekerasan. Persoalannya menjadi krusial ketika kelompok yang dipaksa itu adalah kelompok muslim lainnya.

C. Dinamika Pemahaman Keagamaan 'Ekstrim Kanan'

1. Stigmatisasi Gerakan Islam

Pada abad lalu, misalnya Jansen (1989) menyebut adanya satu gerakan 'Islam militan'. Nurcholish Madjid (1990) menawarkan suatu 'Islam modern', Jalaluddin Rakhmat melontarkan "Islam Aktual", yang sejatinya merupakan wacana berbagai persoalan Islam dengan penalaran kekinian. Jauh sebelum itu Clifford Geertz mengemukakan 3 (tiga) varian muslim di Jawa, yaitu: a) Santri, 2) Priyayi, dan 3) Abangan. Meski tiga varian tersebut disanggah oleh Harsya W. Bachtiar dan Nurcholis Madjid, namun sebagai varian kultural dan komunal masyarakat Indonesia ia tetap dipandang benar. Ketika Geertz datang ke Indonesia tahun 1990(?), ditanya

apakah tesisnya tersebut masih relevan, dia menjawab varians keagamaan tersebut masih belum berubah. Belakangan Bambang Pranowo (2010) menulis tentang 'Islam Jawa.'

Klasifikasi tersebut mewakili realitas sosiologis atau kebudayaan masyarakat Jawa, dan bukannya variasi agama secara asli. Kehidupan masyarakat melahirkan interaksi antara ajaran Islam dan kebudayaan. Tesis Geertz tentang variasi budaya muslim Jawa dipergunakan oleh Orde Baru dalam mengambil kebijakan politik. Sehingga Partai politik pada jaman Orde Baru dibakukan hanya tiga, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar). Tesis Geertz diimplementasikan secara intens, dan mampu melahirkan 'stabilitas' yang cukup lama.

Kondisi tersebut menjadi suatu keadaan yang dijadikan sandaran pembangunan Indonesia. Ketika penguasa hendak menguasai birokrasi, maka kelompok 'priyayi' yang diutamakan. Budaya abangan dipergunakan sebanyak mungkin untuk menghambat simbol-simbol Islam dan perkembangan dakwah, misalnya penanaman kepala kerbau, dan bukan dengan membaca al-Qur'an, saat peresmian proyek-proyek besar pemerintah. Tetapi kadang juga dilakukan secara eklektik (perpaduan/comotan).

Namun ketika laju dakwah semakin menguat, pemerintah Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian dicetuskannya Penataran P-4 (Santiaji P-4). Bagi mereka yang menolak dapat dikenakan sanksi birokrasi, ideologis dan bahkan dicap sebagai pemberontak. Langkah inilah yang kemudian menjadikan pemerintah dengan mudah mencap 'ekstrim kanan' kepada mereka yang menolak kebijakan pemerintah tersebut. Adalah kaum santri, yang kebanyakan menolak itu, kemudian disebut 'ekstrim kanan,' dan dihalau untuk berkuasa. Penolakan kaum santri itu sebagai hasil dari kiprah ijtihadnya, yang didasarkan pada pertimbangan pemikiran dan hati nuraninya. Sebagai ijtihad bisa benar atau salah.

2. Pemahaman *Mainstream* Muslim di Indonesia

Semua orang yang taat beragama ingin agar kehidupannya diwarnai oleh nilai-nilai agama, namun mereka berbeda pada ranah mana agama diaplikasikan. Semua sepakat bahwa agama diterapkan oleh diri dan keluarga (saja), sedangkan pada level bangsa dan negara mereka berbeda pandangan. Amal ibadah seorang muslim menjadi satu bukti akan ketaatan beragamanya itu.

Umat Islam di Indonesia lebih mengedepankan masalah akhlak dibandingkan dengan aqidah dan fiqih. Landasan berpikir mereka adalah bahwa berdakwah dan mengamalkan agama Islam harus didahului dengan pembinaan akhlak pribadi sebelum mengajarkan agama Islam kepada khalayak yang lebih luas. Dari kondisi pemikiran seperti itulah berlangsung penyebaran agama Islam di Indonesia. Bahkan kita tidak mendapati penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan kekerasan. Masyarakat muslim di Indonesia memiliki ciri kehidupan yang moderat, dan itu menjadi satu ciri umum Islam di Indonesia. Masyarakat hidup ramah dan tidak menaruh dendam pada pihak lain.

Mereka mengamalkan agama dengan kesadaran akan berbagai kultur yang ada di bumi pertiwi. Untuk menjadi muslim yang taat perlu perjuangan dalam mengamalkan ajara agama. Satu hal yang menjadikan berbeda di antara orang-orang yang taat beragama itu adalah tingkat toleransinya terhadap paham-paham lain. Orang yang taat beragama memiliki komitmen kepada amal agamanya, sehingga ia menafikan keberadaan pihak lain. Karena orang yang taat memiliki konsen dengan amal agama dan simbol-simbolnya maka ia sering bersifat eksklusif. Namun, orang yang taat beragama tidak otomatis `menjadi 'ekstrim kanan', kecuali bila mereka tidak mentolerir paham atau ideologi pihak lain.

Awalnya, kelompok yang berupaya untuk menjalankan ajaran agama secara baik dan menjauhi larangannya adalah

mereka yang taat dan shaleh. Ketaatan dan keshalehan itu sebenarnya menjadi embrio kefanatikan. Fanatik sebenarnya bermakna netral, ia tidak jelek dan tidak pula baik. Kefanatikan menjadi negatif apabila telah berinteraksi dengan pihak lain yang berbeda kutub dan jalurnya, sehingga menjadi silang pendapat dan aksinya.

Pada beberapa segi pula masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan dapat diselesaikan dengan agama, meski tidak mutlak. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna – sebagaimana diperintahkan oleh agama sendiri – dipandang sebagai suatu respon yang positif dalam kehidupan masyarakat. Sebagian muslim lebih memahami substansi agama yang mewarnai kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Alih-alih mengambil kehidupan beragama yang formal dan kaku, mereka mencairkan suasana dengan inti ajaran yang substantif.

Persoalan penerapan agama telah memicu polemik yang berkepanjangan berkaitan dengan Islam moderat yang menjadi lokus pemahaman Islam di Indonesia. Mayoritas pemahaman Islam di Indonesia merupakan Islam moderat, dengan ciri-ciri (1) Pemahaman agama tidak hanya didasari teks kitab suci, namun lebih banyak menangkap situasi yang melingkupinya, (2) Mendahulukan kaidah-kaidah akhlak yang mulia, agar tercapainya *rahmatan lil-'alamin* (kebaikan dan kemanfaatan bagi alam semesta), (3) Dakwah Islam disebarluaskan dengan cara-cara yang damai, di mana perbedaan paham diselesaikan dengan mengedepankan sikap yang arif dan bijaksana dan, (4) Penerapan ajaran agama yang diutamakan adalah pada level individu, dan keluarga. Sedangkan pada level masyarakat, bangsa, dan negara merupakan kewenangan para politisi dan negarawan. Mereka yang menjadi pemimpin publiklah yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Dalam kapasitas pribadi dan kepala keluarga seseorang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.

Sedangkan bagi mereka yang menyatakan bahwa pengamalan berada pada level kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara itu menjadi keharusan pemimpin. Meski hal ini disanggah oleh kelompok lain karena penerapan ajaran agama meliputi semua aspek kehidupan. Masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa, menjalankan agama secara baik dan istikamah pada level individu dan keluarga akan berimbang pada level yang lainnya. Bila mampu ke arah sana maka baik, tetapi bila tidak (atau belum) mampu maka dapat ditunda pelaksanaannya, sambil tetap berusaha dengan penuh perjuangan.

Sejak awal sejarah Republik Indonesia umat Islam menyadari urgensi penerapan hukum yang bersumber dari agama. Di awal kemerdekaan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) telah memberikan rumusan dalam mukaddimah UUD 45 dengan kalimat: "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya." Meski kalimat tersebut telah dicoret dari UUD 45 yang berlaku, sehingga hanya ada dalam Piagam Jakarta. Namun, ia telah mengilhami para aktivis partai politik Islam, untuk konsen kepada ajaran agama. Sadar akan luhurnya pengamalan agama pada beberapa daerah, yang kekuatan partai politik Islam dan figur agamawannya dominan, mereka berupaya untuk menyponsori penerapan hukum agama secara sektoral, di kota/kabupaten dan Provinsi mereka. Untuk Jawa Barat, Cianjur dan Garut merupakan prototipe bagi penerapan syariat Islam.

Pada empat kali revisi atas UUD 45 yang berlangsung sejak Era Reformasi, para pemimpin umat Islam Indonesia (yang diwakili antara lain oleh pemimpin Muhammadiyah, dan Nahdlatul 'Ulama) dan pemimpin partai-partai politik, tidak banyak diwacanakan semangat Piagam Jakarta. Seolah mereka menutup mata akan adanya khazanah Piagam Jakarta itu. Mereka melakukan itu karena tidak ingin terjadi polemik panjang yang akan menguras energi anak bangsa. Padahal bangsa ini harus segera menyelesaikan problematika yang

aktual dan krusial, yaitu pemberantasan korupsi. Korupsi dipandang dapat menghancurkan bangsa dan negara.

Kondisi ini merupakan langkah yang bijak untuk tidak mengungkit luka masa lalu. Karena bila bangsa ini terjebak kedalam pusaran perdebatan ideologi negara akan membawa konflik dan mengentalkan polarisasi antara nasionalis agamis dengan nasionalis sekuler (Anshari, 1987). Pengkutuban pemikiran dan ideologi bangsa akan membawa bangsa ini pada satu problem yang tidak ada ujungnya. Alih-alih membawa penyelesaian atas bangsa ini, justru dapat mengacaukan suasana.

Semua eksponen umat dan partai politik telah legowo untuk meninggalkan luka lama akibat macetnya perundingan pada Konstituante (Bandung, 19-57). Suatu babakan sejarah yang membawa ketegangan akibat dari tarik ulur antara kelompok nasional religius dan nasionalis sekuler. Kita perlu melihat sejarah dengan jernih dan arif, dan harus kita jadikan guru untuk menatap masa depan. Ideologi Pancasila dan UUD 45 harus menjadikan manusia Indonesia lebih cerdas dan baik dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dapat menjadikan bangsa ini siap untuk bersaing dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Masyarakat Indonesia sepakat untuk membangun 'negara bangsa', dan hidup dengan kebudayaan 'bhineka tunggal ika', yang berkonsekuensi besar bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Ektrim Kanan dan "Ideology counter"

Sebagai bentuk kesalehan muslim, ekstrim kanan bermakna positif. Gaya tersebut perlu dipertahankan sebagai bagian dari aksi individu dan keluarga. Namun bila permasalahannya menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, maka muatan ideologinya dinetralisir. Pengendaliannya dapat melalui konstruk ideologi yang berfungsi menetralsir dan menggiring kelompok 'ekstrim kanan' kepada hubungan yang lebih cair.

Ideologi yang dapat dijadikan sarana menetralsir dan meng-*counter* adalah

Ummah (komunitas trans-nasional), yaitu konsep kebangsaan yang memberikan perhatian yang besar kepada bangsa-bangsa lain dengan landasan tauhid. Di mana konsep ini memberikan penghargaan kepada masyarakat luas dan karya-karyanya. Harkat masyarakat diberdayakan sebaik mungkin agar menjadi bangsa yang besar, bukan semata karena menghargai pahlawannya, tetapi karena memiliki karya-karya unggulan. Ideologi nasionalisme di samping muncul dari kalangan militer, juga dapat tumbuh dari kalangan kelompok terpelajar. Dalam *ummah* terdapat toleransi dan kedamaian, sehingga ia melandasi nasionalisme yang ada.

Nasionalisme yang diemban oleh militer bersifat mempertahankan wilayah NKRI, dari segala tantangan, rintangan, hambatan dan lawan. Tetapi nasionalisme dalam pemahaman ilmuwan adalah mengisi suatu bangsa dengan karya-karya terbaik anak bangsa, sehingga dapat menjadi tonggak-tonggak peradaban. Semua itu dapat terlaksana jika pendidikan menjadi suatu matra dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Temuan-temuan bangsa lain pun dapat diambil oleh Indonesia, sepanjang membawa kebaikan dan kemanfaatan (maslahat) bagi penggunanya. Karenanya, budaya Islam mengenal 'kosmopolitan', yang pengusungnya menuju masyarakat madani.

Pemerintah perlu memberikan apresiasi bila mendapati kelompok pemahaman 'ekstrim kanan' yang tidak menjadi teroris, serta karya-karya unggulan mereka. Liputan media massa juga sangat mendukung pembentukan opini tersebut. Dengan demikian, bahwa pemerintah menghargai adanya ekstrim kanan yang kooperatif terhadap penguasa sebagai pemimpin kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Hubungan antara 'Ekstirm Kanan' Dengan Terorisme

1. Batas Toleransi Pemahaman Umat Islam

Umat Islam diberi kesempatan untuk berbeda, namun perbedaan itu tetap

dijembatani silaturahmi dan kerjasama dalam kebaikan. Berbeda itu boleh, asalkan tidak berpecah belah (*tafarruq*). Karena perpecahan akan membawa kepada persaingan yang tidak sehat, yang bermuara kepada berbagai benturan fisik dan relasi sosial yang mengarah kepada perang.

Perbedaan pemahaman atas ajaran agama di kalangan umat Islam dipandang wajar bila masyarakat senantiasa berpegang pada ajaran yang pokok dan mendasar, yaitu sumber al-Quran dan al-Sunnah. Dalam praktek keagamaan hal tersebut terkait dengan corak jaringan sosial yang berkelindan dengan realitas budaya komunitas. Problematika kehidupan muncul dan memerlukan jawaban, maka jawabannya dapat berbeda. Variansi ajaran yang muaranya ke Al-Quran dan al-sunnah mengilhami gerakan-gerakan dalam masyarakat muslim.

Para pendukung 'Ekstrim Kanan' dapat dilihat dari sisi dua, yaitu: 1) pada tataran pemahaman, dan 2) tatanan praksis. Kedua parameter ini dapat dijadikan pijakan analisis sosiologis dalam mengkaji 'ekstrim kanan'.

Pertama, Ada kelompok yang berupaya untuk memahami agama secara mendasar (radikal). Sehingga dia dapat menemukan nilai agama yang dapat dijadikan sebagai sandaran kehidupan beragama. Tapi kelompok ini tidak berupaya untuk melancarkan serangan, baik paham atau fisik, kepada pihak lain. *Kedua*, Mereka yang berpaham mendasar dan keras, serta berupaya untuk menyebarkan pemahaman mereka itu ke pihak lain, dengan berbagai cara. Termasuk menggunakan serangan bersenjata. Dalam menyikapi mereka, masyarakat muslim lebih banyak yang menentang.

2. Ekstrim Kanan sebagai Bentuk Perlawanan

Masalah ekstrim kanan dalam sejarah Indonesia merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap suatu rezim. Ketidakpuasan itu melahirkan perlawanan umat islam terhadap kebijakan penguasa. Aspirasi itu menyiratkan

pada simbol sosial dan juga pada kepentingan kehidupan muslim yang menangani masalah ini. Aspirasi umat Islam harus didengar dengan baik. Perlawanan dilakukan berdasarkan ajaran agama, karena legitimasi agama adalah yang paling kuat bagi penganut agama. Perlawanan – dengan berbagai gradasinya – menyiratkan suatu amar ma'ruf dan nahyi munkar.

Ketika dakwah Islam diijinkan oleh pemerintah dan bahkan didukung/difasilitasi, maka gerakan 'ekstrim kanan' perlahan akan berkurang. Sehingga energi umat Islam dapat dipergunakan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan oleh negara saja, tetapi bila negara memberikan kebebasan kepada rakyatnya yang kreatif dan inovatif maka beban negara untuk menyejahterakan bangsanya akan semakin ringan. Tetapi bila kehidupan bangsa terkekang, maka negara akan terbebani dalam menyejahterakan rakyatnya. Legitimasi Islam menjadi relevan ketika gerakan-gerakan yang melawan penguasa terus berkiprah sepenuh tenaga untuk membangun basis perjuangannya.

Akan tetapi tidak semua pihak yang ditolak aspirasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupaya untuk mengadakan perlawanan. Hanya kelompok yang memiliki ideologi militan, yang kemudian menyatakan dirinya sebagai lawan dari penguasa — yang karena tidak menjalankan perintah agama — berhak untuk dimusuhi dan diperangi. Sementara kaum muslimin lain tetap berjuang di jalan Allah, tanpa melakukan perlawanan secara terbuka. Kelompok militan pada giliran akan bermetamorfosis menjadi 'Ekstrim kanan.'

Perlawanan kelompok ekstrim kanan tidak semuanya dilakukan dengan cara permusuhan pada penguasa (secara terbuka). Mereka menolak penguasa yang zalim dengan ucapan dan sikapnya. Namun tidak dengan perilaku terbuka (*overt behavior*). Mereka menolak berkompromi dengan penguasa yang dipandang batil dan zalim, dengan cara membangun kelompoknya sendiri. Jamaah ini sebagai

penyemaian ajaran yang berupaya untuk menegakkan kebenaran dan tidak berkompromi dengan kebatilan dalam berbagai bentuknya, seperti korupsi, kesewenang-wenangan, tiran, kezaliman. Sejatinya penguasa diuntungkan oleh adanya pemahaman Ekstrim Kanan karena sebagai pengingat saat lupa, akibat tengah menikmati kekuasaan yang empuk.

Setiap penyimpangan tidak bisa dibiarkan oleh masyarakat dan bangsa. Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dikontrol oleh masyarakat dan aktivis dakwah. Akibat dari akses informasi yang tertutup, para pemimpin islam moderat di Indonesia tidak bisa mengontrol dan memberikan nasehat kepada penguasa, akibatnya puluhan juta jiwa hidup dibawah garis kemiskinan di negeri yang kaya raya. Faktornya adalah ketidakadilan, yang harus dilawan dan dilenyapkan. Mereka berpotensi intelektual tinggi – karena tidak mendapat kesempatan studi – menjadi anak negeri yang sia-sia.

3. Kaitan antara "Ekstrim Kanan" dan Terorisme.

Sistem pemerintahan yang baik adalah yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah yang peduli akan kehidupan rakyatnya akan tetap memperoleh dukungan masyarakatnya. Di samping itu, fakta bahwa kekuatan Barat menyerbu negeri yang mayoritas muslim atau umat Islam, menjadi alasan bagi ditegakkannya perlawanan terhadap imperialisme Barat. Tidak semua yang berpaham 'ekstrim kanan' menjadi teroris.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pendayagunaan sumber-sumber intelektual anak bangsa. Adanya kerjasama dengan Barat, kadang menjadikan kaum muslimin resah. Alih-alih menjadi tuan di negeri sendiri, intelektual muslim justru tersingkir. Dalam jangka panjang kerjasama penguasaan sumber-sumber daya alam di bumi pertiwi dapat mentransfer keahlian dan teknologinya. Sehingga masyarakat muslim tidak akan terkooptasi oleh Barat. Kekuatan

Barat dipandang telah menguras kekayaan alam bumi pertiwi, yang dapat membawa penjajahan jangka panjang. Dengan penalaran tersebut kelompok 'ekstrim kanan' kemudian melancarkan serangan kepada berbagai instalasi milik Barat di negeri-negeri muslim. Dari sini titik tolak internasionalisasi gerakan teror itu terjadi. Gerakan teror transnasional tidak bisa dipisahkan dari arus politik dan ideologi. Bahwa dibalik transfer teknologi terjadi neo-kolonialisme.

Tidak semua kekuatan "ekstrim kanan" menjadi terorisme. Kekuatan teror muncul bila memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) Penguasa dipandang zalim dan tidak memihak kepada rakyatnya, sementara itu dakwah kaum muslimin diberangus dan dibatasi; (2) Adanya jaringan sosial yang bersifat eksklusif, yang memandang paham agamanya sebagai benar, sementara kelompok lain salah. Jaringan sosial siap membela perjuangan mereka tindakan kekerasan; (3) Ideologi agama menjadi landasan untuk menentang penguasa. Agama diinterpretasikan secara mendasar (radikal), dengan mengabaikan faktor kultural masyarakat muslim, dan 4) Dominasi asing pada tingkat akar rumput (*grass root*), yang menjadikan masyarakat muslim termarginalkan.

III. PENUTUP

Sejarah umat Islam di masa jaman Orde Baru dan Era Reformasi menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena di awal kedua babakan sejarah ini umat Islam menempati posisi yang sentral, namun secara perlahan posisinya umat Islam sebagai kekuatan strategis dikesampingkan; kekuatan Islam dimarginalkan.

Mayoritas kekuatan muslim tidak menghendaki makna jihad hanya diartikan sebagai berperang melawan kekuatan musuh-musuh Islam. Kekuatan Islam perlu diadopsi oleh penguasa muslim sekurang-kurangnya menciptakan kebajikan dan keadilan di negeri muslim di penjuru dunia. Selama dakwah Islam dan kedaulatan

negara-negara (yang mayoritas penduduknya) muslim masih berjalan di atas landasan kebajikan. Karena bila dakwah Islam dihambat dan kekuatan asing merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim maka akan merusak harkat dan martabat kaum muslimin. Dalam kondisi seperti hal itu memberi peluang bagi metamorfosis 'ekstrim kanan' menjadi teroris. Perlawanan itu menjadi suatu yang kentara jika tidak dilakukan interaksi dengan baik.

Umat Islam memiliki satu ideologi 'jihad', yang cukup fleksibel maknanya. Suatu ketika ia diartikan usaha menegakkan syiar Islam secara baik dan istikamah. Namun pada lain kesempatan ia berperan sebagai ideologi perlawanan terhadap kemunkaran. Paham jihad baru bisa bertemu dengan terorisme bila memenuhi berbagai persyaratan ideologis, jaringan sosial, pemahaman keagamaan, dan adanya hegemoni Barat di negara muslim.

Para pendukung terorisme melakukan semua itu karena didasari oleh niatan yang tulus dari kalbu mereka atas situasi yang tidak menentu, tidak menunjukkan iktikad yang baik dan berkeadilan. Padahal Kebaikan dan keadilan merupakan prasyarat bagi lahirnya suatu negeri baik yang diridhai Allah SWT. Kekuatan terorisme bukan menjadi pilihan utama perjuangan kaum muslimin. Karena itu mereka perlu diajak bicara dan ditangkap aspirasinya. Langkah tersebut akan dapat

mengurangi metamorfosis dari 'ekstrim kanan' ke terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. Ketua Dewan Editor (2002) *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al-Mawrid (1990) *Qamus inklizy Araby*. Beirut Libanon: Darul 'ilmi lil-malayin.
- Anshari, E.S. (1989) *Piagam Jakarta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendy, M. (2001) *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (buku kedua). Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Esposito, J. L. (2001) *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, jilid II. (Penerjemah: Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W. Poerwanto, Rofik S., dan editor: Ahmad Baiquni, dkk). Bandung: Penerbit Mizan.
- Ferm, V. (1976) *An Encyclopedia of Religion*. Westport Connecticut: Greenword Press Publisher.
- Iqbal, M. (2003) *Kamus Dasar Islam*. Jakarta: Inovasi.
- Koentowidjojo, (2001) *Muslim Tanpa masjid*. Bandung: Mizan.
- Soeryanegara, A.M. (2009) *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Ensiklopedi Islam (EI)*. Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI)*, jilid V, 1989. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

BAMBANG SAIFUL MA'ARIF. *Dari 'Ekstrim Kanan' ke Terorisme*